

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era modern yang ditandai oleh perubahan yang cepat dan kompleksitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan, pemikiran filosofis menjadi semakin relevan untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Sesuatu dapat disebut dengan Negara jika memiliki empat elemen pembentuk (*constitutive element*) yaitu penduduk yang permanen (*permanent population*), wilayah tertentu (*defined territory*), pemerintahan (*government*), dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*). Salah satu dari empat elemen pembentuk negara di atas adalah penduduk yang permanen. Penduduk merupakan kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah, atau dengan kata lain manusia yang menduduki suatu wilayah disebut sebagai penduduk di wilayah tersebut. Jika mereka berkembang biak dan tinggal dalam waktu yang lama maka disebut dengan penduduk permanen suatu wilayah. Manusia dan hal ini lah yang kemudian melahirkan budaya, kebudayaan nantinya (Huda, 2014).

Individu manusia memiliki keunikan atau karakteristik yang khas bagi masing-masingnya, dan tidak ada dua manusia yang benar-benar sama, meskipun mereka mungkin terlahir sebagai kembar. Walaupun ada kesamaan dalam segi fisik, perbedaan dalam hal psikologis sering kali lebih mencolok. Perbedaan-perbedaan ini sering kali disebut sebagai kepribadian. Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor bawaan dan pengaruh lingkungannya. Lebih lanjut, dalam perspektif humanistik, manusia dianggap memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka capai dalam kehidupan mereka. Dalam pandangan ini, dipahami bahwa jika individu dapat mengaktualisasikan potensi mereka sepenuhnya, maka setiap orang memiliki potensi untuk mencapai keadaan

eksistensi yang ideal yang sering ditemukan dalam individu yang telah mencapai puncak potensi mereka. Sebagai manusia beradab yang hidup dalam suatu wilayah yang dipimpin dan diatur oleh pemerintahan, tentu banyak hal yang diinginkan dan dikejar agar tercapainya kehidupan sejahtera dalam bernegara. Khususnya di Indonesia, melihat betapa banyak dan variatifnya tawaran program dan perencanaan pembangunan wilayah yang disuguhkan kepada masyarakat oleh calon pemimpin suatu wilayah dan negara. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat dan memilih mereka dalam kontestasi politik nantinya. Hal ini membuktikan bahwa betapa masyarakat atau manusia menginginkan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Keinginan-keinginan ini lah yang kemudian memberikan manusia kekuatan untuk bertahan hidup. Ibarat pedang bermata ganda, keinginan akan hidup sejahtera tanpa melakukan sesuatu dan menyerahkan sepenuhnya keinginan akan sejahtera (secara pribadi) pada orang lain atau dalam hal ini pemimpin merupakan kekeliruan yang cukup fatal.

Dalam filsafat pragmatisme, pengetahuan tidak hanya diperoleh untuk tujuan pengetahuan semata, tetapi juga untuk memahami masyarakat dan dunia. Pengetahuan juga bukan hanya menjadi objek refleksi, kontemplasi, atau pemahaman semata, melainkan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang bertujuan meningkatkan kebaikan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat serta dunia. Pragmatisme menempatkan tindakan sebagai sesuatu yang lebih penting daripada sekadar pengetahuan atau teori, dan mengutamakan realitas yang terjadi di lapangan daripada prinsip-prinsip teoritis yang berada di atas kertas. Dengan demikian, dalam pandangan pragmatisme, penilaian terhadap pemikiran, gagasan, teori, kebijakan, atau pernyataan tidak hanya didasarkan pada keberlakuan logika dan kecemerlangan rumusannya, melainkan juga pada kemampuan untuk diimplementasikan dan membawa nilai guna dalam meningkatkan kemajuan dan manfaat. Menurut pandangan pragmatisme, otak berperan sebagai panduan untuk tindakan manusia, dan pemikiran, gagasan, serta teori berfungsi sebagai alat dan perencanaan untuk melakukan tindakan. Kebenaran dari segala sesuatu diuji

berdasarkan kemampuannya untuk dijalankan dan diterapkan dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi kemajuan dan manfaat.

Paham pragmatisme, yang meraih popularitas melalui kontribusi filosof William James, tumbuh sebagai respons terhadap perubahan sosial dan intelektual di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Munculnya revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, dan variasi dalam keyakinan keagamaan menciptakan kebutuhan akan suatu pendekatan filosofis yang praktis dan responsif terhadap perubahan. William James, seorang tokoh utama dalam gerakan pragmatis, menekankan pentingnya mengukur kebenaran suatu ide berdasarkan konsekuensi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pragmatisme James tidak hanya menjadi suatu alat analisis filosofis, tetapi juga suatu pandangan hidup yang menangkap esensi dinamika dan ketidakpastian dalam perkembangan masyarakat Amerika pada masanya. Pragmatisme James memandang pengalaman dan tindakan manusia sebagai fokus utama, menciptakan fondasi untuk pandangan dunia yang lebih responsif, praktis, dan terbuka terhadap perubahan zaman.

Secara umum, pendekatan pragmatis telah lama diterapkan di hampir semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk pada tingkat yang lebih kecil. Sebagai contoh, dalam konteks mikro, kita bisa melihat tanda-tanda perilaku aktor politik yang kadang-kadang bersedia melakukan berbagai tindakan yang dianggap tidak etis demi mencapai kepentingan mereka dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, partai politik juga sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan cara-cara tawar-menawar politik yang dapat memberikan mereka keuntungan politik. Ini mencerminkan praktik-praktik pragmatis yang terjadi dalam dunia politik di mana tindakan dan keputusan seringkali didasarkan pada pertimbangan manfaat praktis atau kepentingan politik, daripada prinsip-prinsip ideologis atau etika yang ketat. Pragmatisme sering menjadi dorongan utama dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam konteks kompetisi politik yang sengit. Keputusan akan kebijakan publik tentulah harus memprioritaskan kenyamanan dan

kesejahteraan publik, akan tetapi kerap kali kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat pemerintahan menguntungkan pemegang kekuasaan.

Jika dilihat secara umum, di Indonesia terdapat kecenderungan sikap pragmatis yang lebih terfokus pada pencapaian kekuasaan politik. Dalam upaya mencapai tujuan ini, seringkali ideologi partai politik diabaikan, dan para pelaku politik pragmatis lebih berorientasi pada strategi bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kata lain, seperti yang dijelaskan oleh Kuskridho, aktivitas semacam ini dapat disebut sebagai politik kartel, di mana politik tidak lagi berfokus pada pelayanan kepentingan publik, melainkan lebih menekankan pada upaya memajukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, kepemimpinan dalam partai politik menjadi semakin sulit untuk dipisahkan dari individu-individu yang menduduki posisi kepemimpinan tersebut (Meyer, 2012, p. 22). Gambaran ini mencerminkan situasi dalam politik Indonesia, di mana nilai-nilai etika, baik yang berakar dari ideologi seperti Pancasila maupun norma-norma politik lainnya, tampaknya telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sikap pragmatis seperti ini lebih cenderung terkait dengan perilaku hedonis (Noor, 2014, p. 1).

Dalam kehidupan bernegara, sudah sepantasnya masyarakat atau penduduk memberikan manfaat bagi negaranya atau paling sedikit untuk orang-orang disekitarnya. Dalam aliran filsafat pragmatisme, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasilnya yang memajukan kualitas hidup. Benar tidaknya hasil pikir, dalil maupun teori, dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, tujuan manusia berfikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup manusia lebih maju dan berguna. Sesuatu yang menghambat hidup atau yang tidak memberikan manfaat adalah tidak benar. Oleh karenanya, peneliti mengangkat tema tentang paham pragmatisme dalam kehidupan beragama menurut William James.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka diperoleh sejumlah rumusan masalah diantaranya:

1. Apa itu pragmatisme menurut William James?
2. Bagaimana dampak paham pragmatisme William James terhadap isu-isu kontemporer seperti kebijakan publik, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan dalam konteks masyarakat modern?
3. Bagaimana implementasi paham pragmatisme William James dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat membantu mengatasi tantangan dan perubahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas untuk mendeskripsikan hasil penelitian maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan paham pragmatisme menurut William James,
2. Untuk menganalisis dampak paham pragmatisme William James terhadap isu-isu kontemporer seperti kebijakan publik, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan dalam konteks masyarakat modern,
3. Untuk mendiskripsikan implementasi paham pragmatisme William James dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat membantu mengatasi tantangan dan perubahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Paham Pragmatisme terhadap bernegara memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini tergolong kedalam bagian dari disiplin ilmu Aqidah Filsafat Islam, khususnya pada pemahaman pragmatisme yang dapat mengembangkan wawasan lebih mengenai tentang pemahaman filsafat, yang

tentunya memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan paham aliran-aliran dalam filsafat.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini berfokus untuk membahas pragmatisme dalam bernegara. Harapannya dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih tepat bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat mengenai paham pragmatis dalam bernegara itu sendiri. Sehingga dapat berkontribusi untuk membantu mewujudkan karakter bangsa yang memiliki intelegensi tinggi dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman ilmiah, serta meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam bidang pendidikan dan sosial masyarakat, terlebih untuk kalangan akademisi, masyarakat umum, dan menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan wawasan keilmuan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam, dan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini menjadi acuan utama bagi peneliti dalam merinci perbedaan sebagai gambaran dasar dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dengan judul Paham Pragmatisme dalam Bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat temuan baru tentang bagaimana paham pragmatis itu dalam bernegara namun, di bawah ini terdapat beberapa studi ilmiah yang memiliki relevansi dengan riset kami:

1. Anastasia Jessica Adinda S. *Menyingkap Asumsi Pragmatisme di Balik Kebijakan Publik*, (2019). Tulisan ini lebih menekankan kritik pada kebijakan publik. Ia mengungkapkan bahwa mencapai kesesuaian antara kebijakan publik dan tujuan untuk mencapai kebaikan umum merupakan suatu hal yang menjadi perhatian utama. Namun, dalam praktiknya,

kebijakan politik sering digunakan sebagai alat yang efektif untuk mencapai kekuasaan dalam ranah politik praktis. Jessica juga membahas kasus kebijakan anti-imigran yang diimplementasikan oleh Donald J. Trump ketika menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pandangannya, kebijakan ini dianggap tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan umum. Jessica juga memberikan contoh lain, seperti revisi Undang-Undang tentang penindakan korupsi yang dianggap memberikan keuntungan kepada pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi. Begitu pula dengan perubahan dalam Undang-Undang Agraria pasca-Orde Baru, yang dilihat sebagai upaya membuka pintu bagi investasi asing demi mempertahankan kekuasaan rezim saat itu. (Adinda, 2019, pp. 58–74).

2. Miftah Faried Hadinatha, *Jejak Pragmatisme dalam Politik di Indonesia (Era 2009-2017)*, (2018). Miftah membahas dan menggali jejak pragmatisme dalam dunia politik di Indonesia. Dan lebih condong ke perilaku dari politikus pada era tersebut dalam memenangkan kekuasaan dan proses tawar-menawar di dalamnya. Ia juga menyebutkan untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi politik seringkali ideologi partai dilupakan, lantas pelaku politik pragmatis ini berpikir cara merebut kekuasaan (Hadinatha, 2018).
3. Wasitohadi, *Pragmatisme, Humanisme dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan di Indonesia*, (2014). Pada tulisan ini, Wasitohadi memaparkan praksis implementasi Pendidikan mestinya mengacu pada teori Pendidikan dan didasarkan pada landasan filosofis yang jelas. Agar praksis Pendidikan tersebut dibimbing oleh teori *action guided by theories* maka pemahaman terhadap teori Pendidikan dan akar filosofisnya menjadi penting dan strategis. Beliau juga memaparkan pragmatisme memiliki pengaruh besar dalam dunia Pendidikan yang meyakini benar atau tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah atau tidaknya teori itu bagi manusia dan kehidupannya. Dengan demikian

ukuran untuk segala perbuatan termasuk teori Pendidikan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup serta kualitas Pendidikan (Wasitohadi, 2014, pp. 175–190).

4. Hilarius Andika Kurniawan, *Konsep Kebenaran Pragmatisme Menurut William James Dalam Buku Pragmatism*, (2022). Pada penelitian ini menemukan bahwa kebenaran pragmatisme menurut William James adalah kesesuaian antara ide dengan realitas. Ide yang benar adalah yang dapat diasimilasi, divalidasi, dibenarkan dan dibuktikan. Ide-ide yang salah adalah yang tidak dapat diberlakukan seperti yang disebutkan sebelumnya. Kebenaran menjadi suatu “kebenaran” ketika suatu ide dapat dibuktikan melalui kejadian. Kebenaran juga merupakan sebuah proses, yaitu proses pembuktian itu sendiri dan proses membenaran itu sendiri. Kebenaran dicapai melalui pengujian gagasan dalam pengalaman, dan ditemukan benar jika gagasan itu memberikan kegunaan. Pengalaman merupakan suatu faktor yang penting untuk membuktikan kebenaran. James mengatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang potensial. Oleh sebab itu, jika seseorang ingin mengetahui suatu kebenaran ide, maka ide-ide yang dimaksud itu harus “diaktifkan”. Ide-ide yang benar menggerakkan seseorang untuk “membuktikan” kebenaran itu (Hilarius Andika Kurniawan, 2022).
5. Uranti, *Filsafat Pragmatisme William James Dan Tantangan Teologis Dalam masyarakat Modern*, (2023). Pada penelitian ini menemukan bahwa Tantangan teologis yang muncul dari filsafat Pragmatisme meliputi pergeseran paradigma dalam memahami kebenaran agama. Menurut Pragmatisme, kebenaran agama tidak ditentukan oleh konsistensi logis atau dogma tertentu, melainkan oleh kegunaan dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, teologi tradisional yang mengandalkan otoritas agamadan penekanan pada doktrin tertentu menjadi kurang relevan. Pragmatisme juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam mencapai keyakinan



agama, yang berpotensi memicupergeseran dari otoritas eksternal menuju pengalaman individu yang lebih personal.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disajikan, penelitian yang akan saya lakukan menunjukkan perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya. Sebaliknya, fokus penelitian ini akan tertuju pada pemahaman Pragmatisme menurut William James dalam konteks kehidupan bernegara. Penelitian ini juga akan memeriksa bagaimana para pelaku politik atau pejabat negara menerapkan konsep Pragmatisme dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Lebih lanjut, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip Pragmatisme memengaruhi penetapan setiap kebijakan dan dampaknya pada masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan Pragmatisme dalam ranah kebijakan publik, khususnya dalam konteks kehidupan negara.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Secara etimologis, asal-usul kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "*pragma*," atau bisa juga disebut "*pragmatikos*," yang merujuk kepada tindakan atau perbuatan. Pragmatisme merupakan suatu bentuk filsafat atau pemikiran yang berfokus pada tindakan atau praktik (Keraf, 1987:15). Filsafat ini menyatakan bahwa kebenaran suatu teori atau konsep ditentukan oleh sejauh mana kegunaannya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, segala tindakan dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkannya dalam praktik serta kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Apakah suatu pemikiran, argumen, atau teori dianggap benar atau tidak, ditentukan oleh sejauh mana ia dapat memberikan manfaat dalam konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu, tujuan kita dalam berpikir adalah untuk mencapai hasil akhir yang mampu meningkatkan kemajuan dan kebermanfaatannya dalam hidup kita. Segala sesuatu yang menghambat atau tidak memberikan manfaat dalam kehidupan dianggap tidak benar.

Selama seratus tahun terakhir, aliran filsafat ini telah muncul dengan kuat di panggung intelektual dan dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti Charles Sanders

Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), dan John Dewey (1859-1952) adalah tokoh-tokoh utama dalam perkembangan filsafat pragmatisme. Filsafat-filsafat tradisional pada masa itu cenderung bersifat statis dan melihat dunia sekitar dalam keadaan apa adanya. Namun, pada paruh kedua abad ke-19, tokoh-tokoh seperti Peirce, James, dan Dewey menghadirkan pendekatan yang berbeda, menekankan pada ide-ide pragmatis yang menitikberatkan pada pengalaman dan konsekuensi praktis dalam menilai kebenaran dan makna suatu konsep atau teori., terjadi perubahan yang tidak terduga, terutama setelah revolusi industri yang berkembang pesat. Proses industrialisasi, urbanisasi, dan migrasi besar-besaran penduduk menjadi elemen sentral dalam kehidupan masyarakat Amerika. Perubahan telah menjadi ciri utama dari eksistensi manusia. Dalam bidang intelektual, teori biologis seperti Darwinisme sosial mulai berkembang dan secara luas diterima sebagai pengetahuan umum yang membantu merasionalkan dan menjelaskan konsep perubahan tersebut. Pragmatisme, yang sering juga disebut sebagai eksperimentalisme dan instrumentalisme, muncul sebagai tanggapan filosofis terhadap perubahan-perubahan ini (Albertine Minderop, C. Peirce, W. James, 2005).

William James merumuskan konsep pragmatisme sebagai "sikap beralih dari segala hal, prinsip-prinsip, kategori-kategori, kepastian-kepastian awal, untuk kemudian memusatkan perhatian pada segala hal, hasil-hasil, konsekuensi-konsekuensi, dan fakta-fakta baru." Dalam evaluasinya yang kritis, pragmatisme mengkritik sistem-sistem filsafat tradisional yang dianggapnya salah dalam upaya mencari sesuatu yang dianggap sebagai puncak atau sesuatu yang mutlak, serta esensi-esensi yang dianggap kekal. Para penganut pragmatisme menyoroti pentingnya sains empiris, realitas yang senantiasa berubah beserta tantangan-tantangannya, dan memandang alam sebagai totalitas realitas yang inklusif. Mereka meyakini bahwa keyakinan ilmiah menjadi fondasi utama dalam pandangan mereka. Perspektif ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dicapai melalui metode ilmiah tidak memiliki tempat dalam kerangka berpikir pragmatis.. (Bertens, 1998).

Setiap putusan-putusan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemimpin suatu daerah kerap kali mempertimbangkan banyak hal diantaranya manfaat dari kebijakan yang diputuskan terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai norma dan etika yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat dan lain sebagainya. Meskipun pada masa kini semakin sulit untuk membedakan pelaku politik atau partai politik, masyarakat tidak lagi mampu mengklasifikasikan apakah suatu partai politik bersifat Islam atau non-Islam, atau pun nasionalis, karena semuanya memiliki karakteristik yang serupa. (Jainuri, 2014, p. 10). Tetapi setiap kebijakan yang diambil haruslah memiliki pertimbangan yang condong menguntungkan masyarakat luas dan demi kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Penafsiran terhadap kebutuhan masyarakat dalam kerangka pragmatisme sering kali tidak objektif dan memiliki potensi besar untuk menyajikan representasi yang manipulatif. Hal ini disebabkan oleh pandangan Aaron Wildavsky, seperti yang diungkapkan dalam karyanya "Speaking Truth to Power", bahwa generasi yang terlibat dalam kebijakan publik dipengaruhi oleh logika pasar yang menentukan definisi-definisi mereka terkait dengan tujuan bersama, berbagi, pembelajaran, perubahan, hubungan resiprokal, kesejahteraan masyarakat umum, manfaat, dan sebagainya.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Pertama penulis akan membahas pragmatisme dan prinsip-prinsipnya secara umum dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan studi pustaka (*library research*) sebagai sumber dasar informasi mengenai pragmatisme baik berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan terdahulu yang berhubungan dengan apa yang akan penulis bahas yaitu pragmatisme dan prinsip-prinsipnya.

Lebih lanjut, demi kelengkapan informasi dan mendukung penelitian kali ini penulis melakukan wawancara kepada pejabat pemerintahan setempat yang dapat dijangkau. Hal ini juga penulis lakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang

keputusan-keputusan akan kebijakan publik yang diambil oleh pejabat pemerintahan terkait.

Dari data-data yang penulis dapatkan, penulis akan melakukan analisis data-data yang telah didapatkan dengan menggunakan pendekatan interpretative untuk mengetahui dan memahami bagaimana prinsip-prinsip pragmatisme terkandung dan tercermin dalam tindakan pemerintah.

#### 1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) karena fokus penelitian adalah pada literatur atau sumber-sumber tertulis. (Kartini, 1996, p. 139). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi yang terdiri dari kata-kata tertulis, kutipan dari pernyataan orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada ontologi alamiah, di mana menjaga kesatuan realitas yang dipelajari dan tidak mengasingkannya dari konteksnya dianggap penting. (Moleong, 2000, pp. 3–4). Penelitian ini mengandalkan analisis teks tertulis yang relevan dengan topik pembahasan, yakni mengenai konsep pragmatisme dalam konteks keberpolitikan dan kehidupan berbangsa.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010, p. 102). Informasi dalam penelitian ini akan dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan. Penulis akan mengkategorikan data yang dikumpulkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah karya Anastasia Jessica Adinda S, Menelusuri Pragmatisme Pengantar pada Pemikiran Pragmatisme sementara data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Paham

Pragmatisme dalam bernegara dan analisis terhadap kebijakan di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan di tinjauan Pustaka diatas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas terkait dengan topik penelitian mereka. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa teknik umum yang sering digunakan meliputi studi pustaka, analisis dokumen, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Studi pustaka melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis dokumen mencakup pengumpulan dan evaluasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti kebijakan pemerintah, pidato, dan laporan resmi. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang topik penelitian. Sementara itu, penggunaan data sekunder melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, seperti data statistik atau survei. Dengan memilih dan menggabungkan teknik-teknik ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan kajian literatur, yaitu dengan menganalisis berbagai tulisan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam rangka melakukan penelitian ini, penulis akan menyusun daftar buku dan karya ilmiah yang mencakup data primer dan data sekunder yang memiliki hubungan yang signifikan dengan objek penelitian.

- c. Selanjutnya, penulis akan mengklasifikasikan tulisan-tulisan yang ada di berbagai buku ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kaitan implisit dengan objek penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan penelaahan, pengorganisasian, interpretasi, dan penyajian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Melalui analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses analisis data sering melibatkan teknik-teknik seperti pengkodean, kategorisasi, dan statistik, yang digunakan untuk mereduksi kompleksitas data menjadi bentuk yang lebih dapat dimengerti dan digunakan untuk membuat kesimpulan yang bermakna. Dengan demikian, analisis data memainkan peran kunci dalam memvalidasi hipotesis, mengembangkan teori, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan di berbagai bidang penelitian.

Analisis data melibatkan langkah-langkah untuk mengorganisir dan mengkategorikan data ke dalam pola, kategori, dan elemen dasar, dengan tujuan mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan temuan data. (Sugiyono, 2018, p. 103). Tahapan awal dalam analisis data adalah mengevaluasi semua informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang terhimpun akan diolah menggunakan metode deskriptif-analitis, yang mencakup pemanfaatan berbagai sumber data, baik data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, maupun data sekunder yang bersumber dari literatur terkait dengan subjek penelitian. Pendekatan ini dirancang untuk melakukan analisis mendalam dan penilaian kritis terhadap data yang ada, sehingga hasil akhir dapat memberikan

kontribusi yang relevan terhadap perumusan masalah dalam konteks penelitian ini.

